

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai kolaborasi antara Starbucks Farmer Support Center (FSC) dan Pemerintah Daerah Berastagi dalam mendukung keberlanjutan perkebunan kopi di Indonesia pada periode 2016–2025 dengan menggunakan kerangka Transnational Public-Private Partnership (TPPP) dan konsep *input legitimacy*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kolaborasi antara Starbucks FSC dan Pemerintah Daerah Berastagi menunjukkan tingkat inklusivitas yang relatif baik, terutama dalam melibatkan pemerintah daerah, petani kopi, serta aktor pendukung seperti penyuluh pertanian dan institusi teknis dalam pelaksanaan program. Kehadiran FSC sebagai pusat pendampingan memungkinkan petani memperoleh akses terhadap pelatihan agronomi, praktik pertanian berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas produksi. Namun demikian, inklusivitas ini masih bersifat terbatas karena partisipasi petani lebih banyak terjadi pada tahap implementasi program, sementara ruang keterlibatan mereka dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis masih minim. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi belum sepenuhnya bersifat partisipatif secara substantif, melainkan cenderung top-down dengan inisiatif utama berasal dari pihak korporasi.
- b. Dari sisi akuntabilitas, kolaborasi MNC–negara dalam program FSC memperlihatkan adanya pembagian peran yang cukup jelas antara Starbucks sebagai penyedia sumber daya, pendampingan teknis, dan standar keberlanjutan, serta pemerintah daerah sebagai fasilitator dan pendukung kelembagaan. Mekanisme pelaporan, monitoring program, serta evaluasi teknis menjadi bentuk pertanggungjawaban yang menunjukkan upaya menjaga keberlanjutan program. Akan tetapi, akuntabilitas kolaborasi ini masih sangat bergantung pada

- mekanisme internal Starbucks dan belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengawasan formal dari pemerintah daerah. Lemahnya regulasi lokal yang secara spesifik mengatur kemitraan semacam ini menyebabkan peran negara dalam memastikan transparansi dan keberlanjutan jangka panjang masih belum optimal.
- c. Dalam dimensi deliberasi, kolaborasi antara Starbucks FSC dan Pemerintah Daerah Berastagi menunjukkan adanya proses dialog dan konsultasi, khususnya dalam penyesuaian program dengan kondisi lokal petani kopi. Interaksi antara tim agronomis Starbucks, pemerintah daerah, dan petani memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan pengetahuan teknis yang relevan. Namun, proses musyawarah ini lebih bersifat teknis-operasional dibandingkan deliberasi yang setara dan kritis. Petani belum sepenuhnya memiliki posisi tawar yang kuat dalam menyampaikan aspirasi atau keberatan terhadap arah kebijakan program, sehingga musyawarah belum sepenuhnya mencerminkan proses deliberatif yang setara antaraktor.

Jika melihat bagaimana penelitian ini bagi praktik keberlanjutan perkebunan kopi, kolaborasi antara Starbucks FSC dan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa upaya menjaga keberlanjutan sektor pertanian di negara berkembang tidak lagi dapat bergantung pada kapasitas negara semata. Tantangan struktural seperti perubahan iklim, keterbatasan akses teknologi, lemahnya posisi tawar petani kecil, serta integrasi ke dalam rantai pasok global menuntut adanya keterlibatan aktor non-negara, khususnya perusahaan multinasional, yang memiliki sumber daya, jaringan, dan kapasitas teknis yang lebih besar. Dalam konteks studi Hubungan Internasional, temuan ini memperlihatkan pergeseran pola tata kelola pembangunan dari model *state-centered* menuju *multi-actor governance*, di mana MNC berperan sebagai aktor transnasional yang turut membentuk arah kebijakan dan praktik keberlanjutan di tingkat lokal. Kolaborasi ini mencerminkan bagaimana kepentingan ekonomi global, tanggung jawab sosial perusahaan, dan kebijakan pemerintah daerah saling beririsan dalam sebuah kerangka Transnational Public-Private

Partnership. Namun, penelitian ini juga menegaskan bahwa keterlibatan MNC dalam pembangunan berkelanjutan perlu diimbangi dengan peran negara yang lebih aktif dalam regulasi, pengawasan, dan perlindungan kepentingan petani agar keberlanjutan yang dihasilkan tidak bersifat instrumental atau bergantung pada inisiatif korporasi semata, melainkan mampu menciptakan tata kelola perkebunan kopi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah, khususnya pemerintah daerah, disarankan untuk mengambil peran yang lebih aktif dan strategis dalam menginisiasi kolaborasi keberlanjutan di sektor perkebunan kopi. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator program yang diusulkan oleh perusahaan multinasional, tetapi juga sebagai aktor yang mampu merumuskan kebutuhan lokal petani dan menjadikannya dasar dalam membangun kerja sama internasional. Ke depan, pemerintah perlu memperluas pola kolaborasi tidak hanya dengan MNC, tetapi juga dengan aktor internasional lain seperti organisasi internasional, lembaga donor, lembaga riset, serta organisasi masyarakat sipil transnasional, sehingga upaya keberlanjutan tidak terlalu bergantung pada inisiatif korporasi semata dan dapat berjalan lebih seimbang.

Selain itu, praktik kolaborasi internasional dalam mendukung keberlanjutan perkebunan kopi perlu diarahkan pada pembentukan ruang dialog multistakeholder yang lebih setara dan terinstitusionalisasi. Dialog antara negara, perusahaan multinasional, organisasi internasional, dan komunitas petani menjadi penting untuk membahas isu-isu struktural seperti ketimpangan dalam rantai nilai global, dampak perubahan iklim, serta perlindungan terhadap petani kecil. Dari perspektif Hubungan Internasional, mekanisme dialog semacam ini mencerminkan upaya penguatan tata kelola global yang lebih inklusif, di mana pengambilan keputusan tidak hanya didominasi oleh aktor ekonomi kuat, tetapi juga melibatkan aktor lokal dan negara berkembang secara lebih substantif.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus kajian diarahkan pada peran negara sebagai aktor utama dalam membangun dan mengelola kolaborasi internasional di sektor pertanian berkelanjutan. Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana pemerintah menggunakan instrumen diplomasi pembangunan dan kerja sama internasional untuk menggandeng aktor non-korporasi, seperti FAO, UNDP, atau lembaga keuangan internasional, dalam mendukung keberlanjutan perkebunan kopi. Pendekatan komparatif antarwilayah atau antarnegara produsen kopi juga dapat dilakukan guna melihat perbedaan model kolaborasi dan relasi kekuasaan dalam tata kelola global komoditas kopi. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat memperkaya kajian Hubungan Internasional terkait dinamika interaksi antara aktor negara dan non-negara dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya pada level lokal yang terhubung dengan sistem ekonomi global.